

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Perspektif Kebijakan

Tinjauan Literatur

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan BUMDES diberbagai tempat, yang nantinya bisa dikembangkan di desa lain. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah diambil dengan cara acak, adapun temuan dalam penelitian ini adalah BUMDES bisa menjadi kekuatan baru dalam menunjang pembangunan, karena bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan menekan angka urbanisasi masyarakat desa ke kota, kalau tidak desa akan kehilangan populasi penduduk.

Kata Kunci: pengembangan, BUMDES, kebijakan

Rohani Inta Dewi adalah seorang dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.
E-mail: rohanidewi09@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the process of developing BUMDES in various villages, which can later be developed in other villages. The method used is literature study by collecting several scientific journals taken randomly, while the findings in this study are BUMDES can be a new force in supporting development, because it can create jobs, increase income of rural communities, and reduce the rate of urbanization of rural communities to the city otherwise the village will lose the population.

Keywords: rural development, BUMDES, policy

PENDAHULUAN

Dunia usaha adalah tempat yang menantang di mana berbagai risiko dan peluang ditemui setiap hari. Menurut definisi, tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah mengejar produktivitas ekonomi dan memaksimalkan laba. Produktivitas dan laba, bukan saja di monopoli oleh organisasi *private sector*, namun *public sector* juga dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Pengembangan ekonomi desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional dianggap sebagai suatu isu penting yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Upaya pengembangan ekonomi desa saat ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan terintegrasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa adalah dengan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui organisasi bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan dengan cara Inkubator bisnis, dan menghubungkan pengusaha dengan pemodal *ventura*, dan kekuatan inovatif perusahaan sosial pedesaan berasal dari kemampuan mereka untuk secara strategis menghubungkan Masyarakat pedesaan dengan jaringan supra-regional. Keberadaan UMKM sangat penting, namun kelemahannya pada pembinaan kepada masyarakat masih kurang.

Padahal Negara Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008, namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki ketahanan nasional yang mampu memberikan kontribusi positif dan mandiri sehingga sektor tersebut patut

dikembangkan. Bisa kita melihat dari hasil penelitian di Amerika Latin Karibia menunjukkan UMKM sangat penting di daerah berkembang karena mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Mereka merupakan 90% dari perusahaan di *Location Area Code* (LAC), menyumbang 25% dari PDB daerah dan mewakili 50% dari pekerjaan.

Temuan di atas memberikan suatu gambaran yang menarik tentang keberadaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang. Selain itu upaya untuk pengembangan UMKM telah dilakukan di Indonesia, namun upaya tersebut menemui hambatan di beberapa bidang, terutama Masyarakat kekurangan modal dalam mengembangkan usaha, sehingga rumah tangga bergantung pada jaringan rentenir, di samping itu 'gaya hidup' di kawasan menghambat pertumbuhan Usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah Masyarakat kekurangan modal, sehingga menurut (Vage Mariet, 2016) mengungkapkan bahwa penggunaan kredit pedesaan sebagai input produksi menambah pendapatan bagi UMKM. Namun menjadi masalah disisi lain kesadaran masyarakat dalam mengembalikan uang pinjaman dari BUMDES masih kurang, oleh sebab itu membuat BUMDES gagal. Sementara permintaan kredit di pedesaan Cina sangat besar, dan pinjaman informal telah menjadi sumber utama kredit bagi orang miskin. Belum lagi persaingan asing masuk menghambat keberhasilan usaha.

Oleh karena itu pengembangan lebih lanjut dari perusahaan pedesaan harus fokus pada sejumlah isu kebijakan, termasuk

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Commons Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2020 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

mempromosikan perusahaan Usaha Kecil Menengah, meningkatkan struktur industri, mengembangkan industri pengolahan agribisnis, meningkatkan kualitas dan branding, dan mendorong kolaborasi ekonomi dan teknis regional. Sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, Keberadaan UMKM sangat penting untuk menghidupkan roda perekonomian nasional. Sehingga kedepan pemerintah perlu membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014, dimana semangatnya untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Dalam proses mengembangkan BUMDES tentu ada tantangan dan peluang dihadapi, oleh sebab itu perlu kehadiran pemerintah dalam membuat regulasi yang berpihak, dan memberikan modal usaha bagi para pelaku usaha sesuai dengan mekanisme yang dirancang.

MENGANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Kebijakan umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat, dan menurut Thomas R Dye, kebijakan adalah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Melihat dari dua definisi ini ruang lingkup kebijakan tidak hanya untuk sektor publik saja, namun di dalamnya ada *private*, dan dalam pengelolaan BUMDES kita akan melihat dua sektor itu saling mempengaruhi, karena BUMDES milik publik namun dikelola dengan cara *private*. Bisa kita lihat dari definisi di bawah ini.

Dimana BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desa dalam mengembangkan BUMDES tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan aset tenaga kerja rumah tangga yang memiliki dampak positif pada pengembangan usaha, oleh sebab itu *Home Based Business* (HBB) adalah sebagai kendaraan potensial untuk pembangunan sosial dan ekonomi, karena Bagi beberapa orang rumah adalah tempat bisnis untuk mendatangkan pendapatan. Selama ini kita melihat industri rumahan tidak terlalu diperhatikan, padahal memiliki dampak yang sangat besar baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga kalau itu bisa jalan, BUMDES kedepan bisa menjadi kekuatan baru dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat, karena akan begitu banyak lapangan kerja akan tercipta, dan angka pengangguran akan berkurang, karena *home industri* dikembangkan. Para ibu-ibu bisa bekerja di rumah sambil menjaga anak-anaknya.

Pemerintah menyediakan pasar hasil produksi dari *home industry* dengan mengembangkan BUMDES sebagai tempat menampung yang nantinya BUMDES menjual ke konsumen. Bisa kita lihat keberhasilan usaha itu pada sektor non-pertanian pedesaan di desa Lesotho yang digerakkan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan cara membangun jejaring sosial yang lebih luas, penyediaan pasar, ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur. Adapun yang dikembangkan di Skotlandia misalnya hanya makanan dan pariwisata, namun mampu meningkatkan nilai tambah.

Semangat yang perlu dibangun dalam mengembangkan usaha desa adalah kebersamaan, di mana semua orang terlibat, dan posisi pemerintah membangun infrastruktur dengan tujuan

mempermudah dan mengurangi biaya produksi. Karena selama ini yang terjadi biaya produksi tidak sebanding dengan hasil penjualan, walaupun mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar. Sehingga masyarakat mengalami kerugian. Disamping yang dibutuhkan selain kerjasama yaitu inovasi dan kreativitas. Bisa kita lihat di beberapa desa yang telah berhasil dalam mengembangkan BUMDES yaitu; Tirta Mandiri Kelaten Jawa Tengah mengembangkan destinasi wisata kolam pemandian dengan omset 6,5 miliar per tahun. Begitupun apa yang dilakukan di Karang Kendari Cilacap Jawa Tengah sebagai *suplayer* PLTU, dan di Srisadani Bojonegoro Jatim bergerak dipompanisasi, dan terop. Rata-rata mereka mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melihat temuan diatas menunjukkan bahwa ada beberapa kunci keberhasilan BUMDES yaitu; inovasi, kreativitas, *networking*, dan memberikan kepercayaan manajerial pada karyawan. Dari sekian nilai inilah yang menjadikan BUMDES berhasil, karena di dalamnya dibutuhkan orang-orang yang visioner dan mempunyai ketertarikan di dunia usaha. Di samping itu desa memberikan keleluasaan kepada pengelola dalam mengembangkan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama, dan tidak terlalu jauh diintervensi, namun yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh semua pihak terutama masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan. Sehingga ke depan dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mengembangkan potensi, Bisa kita lihat dari Hasil temuan di Sulawesi yang hanya mengembangkan budidaya rumput laut namun mendatangkan keuntungan besar.

Adapun yang menyebabkan kegagalan BUMDES ketika dikelola hanya oleh pemerintah desa saja, karena tidak dengan cara profesional yang sering sekali ditunjuk hanya orang-orang dekat atau keluarganya, walaupun kadang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Oleh sebab itu perlu dilakukan kerjasama dengan pihak *private*, desa sebagai pemilik saham terbesar. Kalau tidak dikelola dengan cara *private sector*, maka akan banyak menuai kegagalan. Bisa kita melihat di beberapa desa.

Disamping itu menjadi masalah masyarakat pedesaan seperti lemahnya Sumber Daya Manusia, mengingat tingkat pendidikannya masih rendah. Sehingga ke depan perlu dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Di samping itu masalah yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usahanya adalah kekurangan modal, karena susah mendapatkan akses atau tempat meminjam, karena tidak ada jaminan yang dimiliki, apalagi di tempat-tempat formal seperti di Bank. Begitupun hal yang sama terjadi di India dimana para pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan dalam mengakses modal terutama lembaga-lembaga swasta seperti Bank. Oleh karena itu ke depan pemerintah perlu menganggarkan untuk menghidupkan usaha masyarakat desa dengan cara memberikan bantuan modal.

Di samping itu menjadi tantangan masyarakat desa adalah masih buruknya infrastruktur jaringan telekomunikasi yang itu menghambat pembangunan pedesaan, karena saat ini masih berpusat lebih banyak di kota belum merata sampai ke desa. Mengingat kedepan masyarakat secara keseluruhan bergerak menuju masyarakat digital, di mana akses dan penggunaan infrastruktur data sangat penting. pemanfaatan jaringan telekomunikasi dalam rangka mempercepat pembangunan desa. dimana banyak transaksi-transaksi usaha melalui *online* terjadi, dan itu memberikan kemudahan dan mendatangkan nilai tambah.

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Mengembangkan usaha di setiap desa menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan, mengingat angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sekitar 10,25%. Padahal kita memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Kalau tiga potensi ini bisa dikelola dengan baik, maka tidak ada alasan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Namun menjadi problem semua itu belum terkelola dengan maksimal baik oleh Pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang fungsinya sebagai tempat mengelola potensi desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dimana kepala desa bisa mengelola atau mengembangkan desanya sesuai dengan potensi masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi didukung oleh anggaran desa yang terus bertambah, seperti tahun 2017 rata-rata 1,5 miliar di masing-masing desa, dan ini kadang membuat kepala desa merasa kebingungan atau gagap mengelola uang yang sebegitu besar untuk pembangunan, karena sebelumnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu sumber dayanya, sehingga penggunaan anggaran itu tidak tepat sasaran, maka pembangunan fisik maupun sumber daya manusia tidak terlihat hasilnya, karena belum ada perencanaan yang baik. Oleh sebab itu perlu ada BIMTEK untuk kepala desa dan pengurus BUMDES yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas building, mengingat anggaran yang dikelola sangat besar.

Dengan anggaran yang sekian besar ini seharusnya bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal desa mempunyai keleluasaan mengembangkan desa masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan Setiap Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, karena sudah jelas tujuan bernegara adalah memberikan kesejahteraan. Bahkan dalam Undang-undang desa dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai tempat menampung hasil bumi dan barang jasa yang diproduksi oleh masyarakat.

Namun masalahnya masih kurangnya inovasi dan ketaifitas pengurus BUMDES dalam membuat usaha, sehingga BUMDES perlu melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usaha, dengan cara memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi, dan pemasaran. supaya dapat dilaksanakan dimana saja tidak mengenal waktu dan tempat, karena melalui teknologi kita bisa membangun relasi dengan berbagai macam kalangan.

Di zaman yang serba canggih ini BUMDES bisa memanfaatkan teknologi seperti *private sector*, misalnya Bukalapak, dan Traveloka, dimana Proses pemasaran dan transaksinya melalui IT. Oleh sebab itu, kedepan perlu pengadaan jaringan komunikasi dan informatika oleh pemerintah kabupaten atau provinsi sebagai faktor penunjang, dan di setiap desa terkoneksi jaringan internet. Melalui internet desa itulah nantinya para pengelola bisa membangun koneksi dengan pihak lain, karena desa harus siap mengikuti perkembangan zaman, supaya Pendapatan Asli Desa semakin bertambah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Meningkatkan pendapatan asli desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tujuan-tujuan ini akan tercapai manakala ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh masyarakat BUMDES, dan itu bisa kita melihat di Yuanji, dimana masyarakat menggunakan produk lokal, seperti tepung, tahu dan cabai di hotel. Kepala desa Yuanja mengorganisir pabrik-pabrik produksi makanan ringan, tahu, cabai dan bahan pangan lainnya di desa untuk meningkatkan ketahanan pangan. Badan Usaha Milik Desa juga harus mulai berpikir kearah sana untuk membeli produk *Home Industry*.

Hasil produksi itu juga bisa disuplai ke tempat-tempat pariwisata, sehingga Kedepan pemerintah perlu mengembangkan dunia pariwisata pedesaan yang mendukung kebijakan industri jasa terutama pariwisata. Dengan begitu banyak serapan tenaga kerja yang bisa ditampung terutama anak-anak muda, dan ibu-ibu. Biar mereka tidak pergi bermigrasi ke kota.

Dengan berkembangnya pariwisata desa, setiap restoran diwajibkan untuk membeli bahan dari BUMDES, di mana masyarakat menjadi penyedia bahan pokok bagi para wisatawan dari hasil bumi. Supaya masyarakat tidak hanya menjual barang mentah saja yang harganya murah, dengan begitu masyarakat mendapatkan nilai tambah untuk kesejahteraannya.

Sesuai dengan konsep pembangunan saat ini adalah membangun dari desa, atau membangun dari kecil ke besar, bukan sebaliknya. mengingat maju tidaknya negara sangat tergantung pada kemajuan desa. Negara terbentuk dari kumpulan-kumpulan masyarakat dari berbagai macam pelosok. desa harus mulai berbenah dan berfikir bagaimana menjadikan desanya menjadi mandiri dan sejahtera. Dengan mengembangkan BUMDES, karena sangat disayangkan kalau uang negara yang berapa miliar rupiah tidak dimanfaatkan dan hilang begitu saja karena manajemen yang masih kurang baik. Karena tidak ada komitmen dan kesadaran bersama untuk membangun ekonomi. Kalau semua itu sudah maju yang mendapatkan untungnya adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu BUMDES harus dikelola dengan benar, bila perlu pengurusnya difasilitasi melakukan study banding ke desa yang sudah maju BUMDESnya, supaya memiliki gambaran apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Bila perlu Pemerintah untuk menghidupkan BUMDES dengan mengadakan *event* atau kompetisi untuk membangkitkan semangat kepada para pengurus supaya terus melakukan inovasi, dan memberikan reward kepada pemenang kompetisi. Dengan menambah anggarannya menjadi lebih besar, sehingga nantinya akan melahirkan etos kerja bagus. Karena Kedepan BUMDES harus menjadi ujung tombak dalam pembangunan Indonesia, karena desa itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari pengurusan administrasi sampai urusan ekonomi. BUMDES paling tidak menjadi jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Kalau itu bisa berjalan akan banyak masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di masing-masing desa ini membawa angin segar untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. BUMDES harus terus menerus melakukan kerja keras, mengingat jumlah desa di Indonesia 72.000 dari Sabang

sampai Merauke, dan kalau semua desa memiliki BUMDES, maka sekian ribu lapangan kerja akan tercipta. Adapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan pasar, memberikan modal usaha untuk para petani dan pengerajin.

KESIMPULAN DAN DISKUSI

Badan Usaha Milik Desa bisa menjadi kekuatan baru dalam mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dengan menggunakan berbagai bentuk modal pedesaan, karena BUMDES bisa memberikan kontribusi penting untuk pembangunan. bisa kita melihat dari konsep pembangunan yang berkembang saat ini, di mana pembangunan dimulai dari kecil ke besar atau dari desa ke kabupaten sesuai dengan konsep SDGs.

Sehingga pengembangan desa harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun agenda kebijakan, karena desa lah yang memiliki kekayaan alam baik dalam bidang pertanian dan pariwisata. di mana sebagian besar masyarakatnya menjadi petani, dan 35% penyumbang kemiskinan adalah masyarakat petani, karena yang menjadi masalah ketika mereka panen dibeli dengan harga murah tidak seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan, secara otomatis petani dirugikan. Oleh sebab itu ke depan perlu diadakan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas terutama bagaimana cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi supaya mendapatkan nilai tambah.

Di samping itu potensi lain yang bisa dikembangkan adalah pariwisata pedesaan, dimana yang menjadi pengelola dan penyedia barang dan jasanya adalah masyarakat itu sendiri, karena saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pariwisata, semakin banyak wisatawan datang, maka pendapatan semakin banyak. Baik yang didapatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena pariwisata pedesaan bisa menjadi salah satu kekuatan, karena masyarakat desa terkenal dengan keramahan masyarakatnya, atraksi alam dan budaya serta keamanan dan keselamatan. namun menjadi kelemahan utama adalah manajemen yang buruk. Sehingga kedepan kalau desa mau maju maka sumber daya manusia harus dipersiapkan supaya mampu memetakan potensi desa masing-masing supaya tepat sasaran, karena selama ini banyak sekali BUMDES yang gagal.

REFERENSI

- Yen-len Agnes chiu, to a sustainable company: climate change impact factors for corporate responsibility and performance, Springer Science+Business Media New York 2012
- Hutabarata, Zoel, "Absorptive Capacity of Business Incubator for Rural Community SMEs Located in Desa Indonesia", Journal Social and Behavioral Sciences (2014), hal 115
- Richter, Ralph, "Rural social enterprises as an inherent intermediary: Innovative power to connect rural Communities with supra-regional networks", journal 2Leibniz Institute for Research on Society and Space (2017).
- Effendi, Mahfud, "Bureaucratic reform of UMKM with the concept of integrate one stop service through linkage channeling programs to go to Asean Economic Community (MEA)", jurnal pendayagunaan aparatur negara 2015, hal. 06
- Weslynn S. Ashton, Financing resource efficiency and cleaner production in Centra America (Springer-Verlag GmbH Germany 2017)
- Nikaidoa, yuko, What is hampering and what improves small business access to formal credit in India? "Review of Development Finance 5 (2015) 43–52 (Collins et al., 2009; Rutherford, 2001),
- David moyes, Contrasting Perceptions of the Challenges of Rural SMEs: Reconciling Enterprise and Agency Views, Emerald Group Publishing Limited (2014)
- Vange Mariet, Financing village enterprises in rural Bangladesh: What determines non-farm revenue growth? (Whitworth University; Emerald Group Publishing Limited, 2016)
- Cheng Xiang, Microfinance through non-governmental organizations and its effects on formal and informal credit: Evidence from rural China, (Beijing, 2015)
- Xue liang, The evolution of township and village enterprises (TVEs) in China, (china: Emerald Group Publishing Limited 2013)
- Lasswel, H.D, The policy orientation, in lerner and lasswll (eds) 1951b:5
- Dye, T.R, Understanding Public Policy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (1987)
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa
- Vange Mariet, Financing village enterprises in rural Bangladesh: What determines non-farm revenue growth?, (Whitworth University; Emerald Group Publishing Limited, 2016)
- Robert Newbery, Home-based business sectors in the rural economy, Lincoln, 2013)
- Tsepiso A. Rantso, Factors affecting performance/success of small-scale rural non-farm enterprises in Lesotho, (Roma; Emerald Group Publishing Limited 2016)
- Kathryn A. Burnett, Adding or subtracting value?: Constructions of rurality and Scottish quality food promotion, Emerald Group Publishing Limited (2014)
- www.Bumdes.id
- Ines Alegre, Social innovation success factors: hospitality and tourism social enterprises (spain; Emerald Group Publishing Limited 2016)
- Achmad Zamroni, Livelihood Strategy in Indonesian Coastal Villages: Case Study on Seaweed Farming in Laikang Bay, South Sulawesi Province, (Springer Science 2014)
- Sharon Moore, Reform of state owned enterprises and challenges in China, (China; Emerald Group Publishing Limited 2006)
- Nikaidoa yuko, What impedes and increases the access of Small Businesses to formal credit in India? "Review of Development Finance 5 (2015) 43-52
- Koen Salemin, Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas, (Lincoln; journal of Rural 2015)
- Data BPS tahun 2015
- Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Mengatur tentang Desa; didalamnya juga dijelaskan mengenai kewajiban desa untuk membentuk BUMDES.
- Jing Gao, Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China, (China; Tourism Management, 2017)
- Jing Gao, Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, What impedes and increases the access of Small Businesses to formal credit in India? 2017 tentang jumlah desa yang ada dilombok barat